BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

Adapun definisi kebijakan publik menurut beberapa para ahli, sebagai berikut:

a) Menurut Friedrich, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang mengandung berbagai peluang dan hambatan untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan (Pramono, 2020).

b) Menurut Anderson, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang dirancang oleh aktor atau sekelompok aktor dengan dengan tujuan tertentu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi (Taali et al., 2024).

c) Menurut Jones (1997) menjelaskan kebijakan publik dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dari kebijakan pemerintah yang telah ada sebelumnya, dengan melakukan perubahan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan (Khairi, 2020).

2. Evaluasi Kebijakan

a. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan karena berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Berikut beberapa definisi evaluasi kebijakan menurut para ahli, yaitu:

1) Thomas Dye dalam (Taali et al., 2024) bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian yang terencana, terstruktur dan berdasarkan data terhadap dampak kebijakan atau kebijakan pemerintah terhadap sasaran yang dituju dengan menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
2) Menurut Anderson dalam (Rantung, 2024), evaluasi kebijakan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu kebijakan yang mencakup isi kebijakan, proses pelaksanaannya, serta dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan.
3) Jones, evaluasi adalah *activity designed to judge the merits of government program which varies significantly in the specification of object, the techniques of measurement, and the methods of analysis.* Berdasarkan definisi tersebut, evaluasi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kualitas dari suatu program pemerintah dengan menggunakan objek, Teknik pengukuran, serta metode analisis yang berbeda sesuai kebutuhan (Rustiyani et al., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan ,merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan suatu kebijakan guna mengetahui apakah kebijakan itu berjalan sesuai tujuan, seberapa efektif pelaksanaannya, serta apa saja dampak yang dihasilkan masyarakat.

b. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Wibawa (dalam Nugroho 2009), fungsi evaluasi kebijakan menjadi empat bagian fungsi utama, yaitu:

1) Eksplanasi, memungkinkan pengevaluasi mengidentifikasi masalah, kondisi, serta aktor yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.
2) Kepatuhan, untuk menilai apakah tindakan baik birokrasi maupun pihak lain yang sudah sesuai dengan prosedur standar kebijakan.
3) Audit, memastikan apakah hasil kebijakan benar-benar sampai kepada kelompok sasaran atau justru terjadi kebocoran dan penyimpangan.
4) Akunting, membantu mengukur dampak ekonomi dari kebijakan yang diterapkan.

c. Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut Langbein yang dikutip oleh (Warman et al., 2023), tipe evaluasi kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Evaluasi hasil *(outcomes),* yaitu evaluasi yang menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
2) Evaluasi Proses *(process),* yaitu evaluasi menilai pelaksanaan kebijakan dengan melihat kesesuaian antara proses implementasi di lapangan dengan petunjuk prosedur atau teknis yang telah ditetapkan.

Adapun menurut Anderson yang dikutip oleh (Permatasari, 2020) dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Evaluasi sebagai kegiatan yang memiliki fungsi penting dalam proses kebijakan, sehingga keberadaannya dianggap sama penting dengan penyusunan kebijakan.
2. Evaluasi berfokus pada kinerja kebijakan dengan melihat tingkat kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaanya.
3. Evaluasi yang dilakukan secara terstruktur untuk menilai apakah kebijakan telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta mempertimbangkan biaya, manfaat, dan pihak yang memperoleh manfaat dari kebijakan.

d. Tahapan Evaluasi

Kebijakan publik dibentuk melalui serangkaian proses yang melibatkan berbagai pihak dalam tahap perencanaan dan pelaksanaanya. Proses kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan pemikiran dan pengambilan keputusan dalam penyusunan suatu kebijakan. Menurut Dunn, proses kebijakan terdiri atas lima tahapan utama, yaitu (Fatmariyanti & Fauzi, 2023):

1) Perumusan Masalah, proses mengidentifikasi serta menjelaskan keadaan yang memicu masalah sehingga diperlukan solusi melalui kebijakan.
2) Peramalan *(Forecasting)*, tahap yang memperkirakan dampak konsekuensi yang mungkin terjadi di masa mendatang dari setiap alternatif kebijakan, termasuk jika kebijakan tidak diterapkan.
3) Rekomendasi Kebijakan, menilai berbagai alternatif kebijakan dan merekomendasi pilihan paling efektif dengan memberikan manfaat terbesar.

4) Monitoring Kebijakan, proses mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk memantau kemajuan, dampak, serta kendala yang timbul selama implementasi.
5) Evaluasi Kebijakan, proses menilai secara menyeluruh hasil dan kinerja kebijakan guna mengukur tingkat keberhasilan serta menjadi dasar perbaikan di masa depan.

e. Model-Model Evaluasi Kebijakan

Model evaluasi yang berkembang dari upaya yang terus dilakukan dalam proses pengukuran serta keinginan untuk merumuskan prinsip-prinsip evaluasi agar lebih jelas dan terarah. Setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga perlu dipertimbangkan dengan baik dalam penggunaanya. Oleh karena itu, para ahli telah mengembangkan berbagai model evaluasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi, sebagai berikut: (Warman et al., 2023)

a. *Goal-oriented Evaluasi Model* (Model Evaluasi berorientasi Tujuan)

Ralph W. Tyler adalah salah satu tokoh yang mengembangkan model evaluasi awal yang berfokus pada pencapaian tujuan. Model ini menilai keberhasilan program berdasarkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan Tujuan
2. Membuat Indikator
3. Membuat Instrument
4. Memastikan program telah berakhir
5. Menganalisis data

6. Membuat Kesimpulan
7. Mengambil Kesimpulan

b. *Goal-oriented Evaluasi Model* (Model Evaluasi bebas Tujuan)

Michael Scriven mengembangkan model evaluasi yang menekankan pada perubahan perilaku sebagai dampak dari suatu kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan. Dalam model ini, terdapat tiga jenis dampak, yaitu dampak simpangan negatif yaitu dampak negatif yang tidak diharapkan, kedua dampak positif yaitu dampak yang sesuai dengan tujuan, dan ketiga dampak positif tambahan yang melebihi hasil yang telah ditetapkan.

c. Model Evaluasi Sumatif dan Formatif

Model evaluasi internal yang dikenal sebagai evaluasi formatif bertujuan untuk menilai pelaksanaan program yang sedang berlangsung. Evaluasi ini juga berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, memastikan setiap komponen bekerja dengan baik, serta menjadi dasar dalam menentukan perlunya perbaikan atau penyesuaian program. Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir pelaksanaan program dengan tujuan menilai tingkat keberhasilan secara keseluruhan. Evaluasi ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan terkait kelanjutan program. Penilaiannya mencakup pencapaian tujuan, perubahan

yang terjadi, serta kemampuan program dalam menyelesaikan suatu masalah.

d. *Countenance Evaluation Model*

Countenance Evaluation Model merupakan model evaluasi yang digunakan untuk mengkaji tahapan suatu program beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap sebelum pelaksanaan yang menilai kondisi awal, faktor yang diperkirakan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan serta kesiapan sumber daya manusia.
2. Tahap pelaksanaan yang menilai kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan
3. Tahap pada akhir kebijakan bertujuan untuk melihat perubahan atau dampak yang dihasilkan setelah program dilaksanakan.

e. Model evaluasi responsif

Model evaluasi responsif merupakan pendekatan evaluasi yang banyak digunakan dalam kebijakan sosial, khususnya pada permasalahan yang memerlukan perhatian terhadap aspek kemanusiaan. Model ini berfokus pada tanggapan dan pengalaman berbagai pihak terhadap pelaksanaan kebijakan, serta menilai dampak yang ditimbulkan dari hubungan sebab-akibat dari kebijakan. Evaluasi ini dikatakan responsif apabila berfokus pada pelaksanaan kegiatan, memenuhi kebutuhan pihak-pihak terkait, dan

mempertimbangkan perbedaan nilai dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

f. Model Evaluasi *CIPP*

Model evaluasi CIPP *(Context, Input, Process, Product)* merupakan pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam melalui empat tahap evaluasi, dimana setiap tahap menghasilkan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu:

1. Evaluasi konteks bertujuan mendukung keputusan perencanaan dengan meninjau kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta visi dan misi lembaga.
2. Evaluasi input digunakan untuk mendukung penentuan strategi pelaksanaan dengan menilai ketersediaan dan kualitas sumber daya.
3. Evaluasi proses bertujuan memantau pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan rencana.
4. Evaluasi produk digunakan untuk menilai hasil yang dicapai serta sebagai dasar dalam menentukan kelanjutan program.

g. *Model Evaluasi CSE-UCLA (Centre for the Study of Evaluation, University California al Los Angeles)*

Model evaluasi *CSE-UCLA* merupakan model evaluasi yang bersifat komprehensif yang terdiri atas beberapa tahapan yang disusun secara berurutan, yaitu penilaian kebutuhan *(Need Assessment)*, tahap perencanaan dan

pengembangan *(Planning and Development)*, dan tahap pelaksanaan *(Implementation).*

h. *Discrepancy evaluation model (DEM)*

Menurut Malcolm M. Provus, kata discrepancy berarti kesenjangan atau perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Model ini memiliki konsep yang sistematis, dan mudah diterapkan, karena hasil evaluasinya secara jelas menunjukkan adanya kesenjangan. Pelaksanaan evaluasi dengan model ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Menyusun desain dan standar kebijakan yang ideal
2. Merencanakan proses evaluasi
3. Mengumpulkan data untuk membandingkan kondisi di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan
4. Menilai kinerja kebijakan berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif
5. Mengukur kesenjangan antara standar dan pelaksanaan kebijakan yang sebenarnya
6. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaksana kebijakan
7. Merumuskan perbaikan guna mengatasi kesenjangan yang terjadi

f. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Dalam proses evaluasi kebijakan, Menurut Dunn dalam buku (Dunn, 2017) terdapat enam indikator yang dapat digunakan untuk menilai suatu kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas merupakan ukuran untuk melihat sejauh mana tujuan kebijakan atau program dapat tercapai. Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan, seperti anggaran, tenaga, waktu dan sarana pendukung. Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah tujuan program dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang tepat.
3. Kecukupan ini menunjukkan sejauh mana hasil dari suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Artinya, suatu program tidak hanya dilihat dari keberhasilannya, tetapi juga dilihat apakah hasil yang dicapai sudah cukup memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi.
4. Perataan berhubungan dengan pemerataan manfaat program kepada kelompok sasaran secara adil. Kriteria ini penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sudah menjangkau seluruh pihak yang seharusnya menerima manfaat.
5. Responsivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan, harapan, dan tanggapan dari masyarakat atau kelompok sasaran.
6. Ketepatan digunakan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan yang dilaksanakan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

3. Kebijakan Penanganan Stunting

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan percepatan penurunan stunting melalui (Perpres No. 72 Tahun 2021) tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini mengatur berbagai strategi dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menangani permasalahan stunting secara terpadu dan berkelanjutan.

a) Tujuan Kebijakan Stunting

Tujuan percepatan stunting sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi masyarakat. Kebijakan ini menekankan pentingnya pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil, bayi, dan anak balita untuk mencegah gangguan pertumbuhan. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memperbaiki pola pengasuhan dalam keluarga dan memperluas akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai.

b) Program Penanganan Stunting

Upaya percepatan penurunan stunting juga dijelaskan dalam Pasal 8 yang mengatur mengenai pelaksanaan Rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah melaksanakan program ini tujuannya untuk mencegah dan mengatasi stunting sejak dini. Program ini mencakup pendataan dan pendampingan keluarga berisiko stunting, edukasi bagi calon pengantin, pemantauan keluarga berisiko, peninjauan kasus stunting untuk penanganan yang lebih efektif.

c) Pelaksanaan Kebijakan Stunting

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting diatur dalam Pasal 10, yang menegaskan bahwa program penanganan stunting dilaksanakan melalui kerja sama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai sektor terkait. Dalam pelaksanaanya, pemerintah melakukan penguatan dalam aspek perencanaan dan penganggaran program, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program penanganan stunting. Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga, diharapkan pelaksanaan program penanganan ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

4. Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis merupakan intervensi pemerintah yang bertujuan menurunkan angka stunting melalui pemenuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini menyalurkan makanan bergizi secara rutin di sekolah dan komunitas untuk mendukung pertumbuhan anak, mencegah gangguan perkembangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasaran utama dalam program ini meliputi anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui (Prajoko, 2026).

Pelaksanaan MBG ini didasarkan pada Peraturan No. 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan ini menetapkan kerangka tata kelola program yang mencakup koordinasi lintas kementerian dan Lembaga, standar

keamanan, pengawasan mutu makanan, dan percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal untuk memastikan makanan yang diberikan aman, bermutu dan sesuai kebutuhan gizi. Selain itu, Peraturan ini juga menegaskan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan kualitas serta keterjangkauan makanan bergizi gratis, sekaligus memperluas cakupan penerima manfaatnya. Selain berkontribusi dalam pemenuhan gizi, program MBG juga memiliki keterkaitan dengan upaya penanganan stunting, karena asupan gizi yang cukup dan berkualitas merupakan faktor utama dalam mencegah terjadinya stunting pada anak. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya menyediakan asupan gizi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal dan mendorong perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM setempat.

5. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Evaluasi Program MBG ini dilakukan untuk menilai sejauh mana program ini mampu mencapai tujuan dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting. Sasaran program ini mencakup kelompok rentan, terutama peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kelompok tersebut diprioritaskan karena memiliki risiko tinggi terhadap permasalahan gizi, sehingga diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaanya, program MBG melibatkan berbagai sumber daya, baik tenaga pelaksana seperti tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan pemerintah daerah, dukungan anggaran serta

ketersediaan bahan pangan. Pelaksanaan program dilakukan melalui kerja sama lintas sektor yang meliputi penyediaan, pengolahan, hingga ke pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. Proses ini juga disertai dengan pengawasan untuk menjaga kualitas makanan serta memastikan penyaluran berjalan sesuai dengan ketentuan.

Hasil pelaksanaan program menunjukkan adanya kontribusi terhadap perbaikan status gizi masyarakat, yang ditandai dengan penurunan angka stunting dan meningkatnya kondisi kesehatan anak. Selain itu, program ini juga memberikan dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat serta berkembangnya usaha lokal. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti makanan yang tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi ini juga diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program di lapangan, termasuk kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta mengidentifikasi hambatan yang perlu diperbaiki agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

6. Kebijakan Pelaksanaan Makan Gratis di Berbagai Negara

Pemberian makanan gratis di sekolah telah menjadi salah satu strategi penting yang diterapkan oleh berbagai negara untuk mendukung kesehatan dan Pendidikan anak-anak. Kebijakan ini memastikan pemenuhan gizi harian siswa, tetapi juga mendorong kehadiran di sekolah, meningkatkan prestasi akademik, serta mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Berbagai negara di dunia telah mengembangkan program makan gratis yang memiliki karakteristik dan tujuan berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial

dan ekonomi masing-masing. Berikut adalah perbandingan program pemberian makanan gratis di beberapa negara lain sebagai berikut:

Brasil menjalankan *Brazilian National School Feeding Programme (PNAE),* yang merupakan salah satu program makanan sekolah terbesar dunia. Program ini memenuhi 30% kebutuhan gizi siswa yang mendapat dua porsi makanan harian, 70% untuk siswa Pendidikan dasar penuh waktu, dan 20% siswa yang hanya mengikuti sekolah setengah hari (Arpan & Sophian, 2024). Sementara Finlandia menerapkan program makanan gratis untuk semua siswa dari taman kanak-kanak hingga SMA untuk mendukung sistem pendidikannya yang terdepan. Tujuan utamanya adalah asupan nutrisi memadai untuk kemampuan belajar siswa dan membentuk pola makan sehat sejak dini. India meluncurkan *Mid-Day Meal Scheme* sejak 1995 untuk meningkatkan literasi melalui peningkatan pendaftaran sekolah, mencegah putus sekolah dengan memastikan kehadiran siswa, serta memperbaiki status gizi siswa dengan pemberian makanan tambahan (Shrivastava et al., 2015).

Selain itu, Amerika Serikat telah melaksanakan *National School Lunch Program (NSLP)* sejak tahun 1946, menyediakan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Program ini bertujuan untuk menjaga nutrisi anak agar kesehatan terjaga dan proses belajar tidak terganggu akibat kelaparan (Beleson, 2021). Jepang juga memulai program *"Kyushoku"* pada tahun 1889, awalnya untuk anak miskin di Prefektur Yamagata untuk meningkatkan kehadiran siswa dan mendukung perkembangan akademik siswa (Krisanthi & Widiastika, 2024).

Tiongkok meluncurkan *Rural Student Nutrition Improvement Program (RSNIP)* pada akhir 2011, yang menargetkan gizi siswa SD

hingga SMA di wilayah miskin untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak yang rentan. Sejalan dengan langkah tersebut, Indonesia menetapkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 yang menjadi dasar pembentukan Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan program pemenuhan gizi nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis bagi kelompok rentan.

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Pengertian Kebijakan *(Policy Brief)*

Policy brief merupakan ringkasan analisis mengenai suatu kebijakan yang ditujukan kepada para pengambil kebijakan keputusan tingkat tinggi. Dokumen ini juga bertujuan mengidentifikasi isu-isu penting, menyajikan pilihan kebijakan, serta memberikan bukti dan rekomendasi yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan.

Policy Brief atau risalah kebijakan merupakan salah satu bentuk tulisan yang digunakan untuk menjelaskan pemikiran dalam menentukan pilihan kebijakan. Dalam proses advokasi kebijakan, *policy brief* sering dimanfaatkan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan atau organisasi terkait mengenai permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan akan alternatif kebijakan yang diharapkan. *policy brief* ini berfungsi sebagai pendorong bagi pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan yang tepat.

Menurut modul pelatihan analisis kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara, policy brief memiliki karakteristik, yaitu: pertama, *policy brief* digunakan untuk menyampaikan atau menjelaskan rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Kedua, *policy brief* umumnya berisi penjelasan yang singkat dan jelas dengan Bahasa sederhana yang mudah dipahami, didukung data

relevan serta ditujukan kepada instansi yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Ketiga, *policy brief* berfungsi sebagai penghubung antara peneliti atau analisis kebijakan dengan para pengambil keputusan untuk menunjukkan urgensi suatu permasalahan, rekomendasi kebijakan dan menyertai bukti pendukung (Heryana, 2020)

2. Fungsi *Policy Brief*

a. Fungsi Advokasi, yaitu memberikan alternatif solusi terhadap suatu permasalahan kebijakan. Melalui fungsi ini, *policy brief* menjelaskan alasan mengapa suatu kebijakan perlu dipilih dan manfaat atau keberhasilan yang diharapkan dari kebijakan.

b. Fungsi Eksplorasi, yaitu memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan atau dilakukan apabila suatu kebijakan diterapkan. Fungsi ini menjelaskan jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Tujuan *Policy Brief*

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017, tujuan utama *policy brief* adalah untuk mendukung proses perumusan kebijakan dengan menyediakan informasi yang relevan bagi Lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan.

4. Manfaat *Policy Brief*

Berdasarkan (*Modul Pelatihan Lanjutan Analisis Kebijakan LAN*) manfaat yang diperoleh dari *policy brief* yaitu:

a. Bagi Pembaca, memberikan informasi mengenai isu kebijakan yang memerlukan penanganan cepat serta memuat rekomendasi kebijakan. Penyajiannya singkat, menggunakan Bahasa yang

mudah dipahami dan sering dilengkapi dengan desain yang menarik sehingga memudahkan pembaca, khususnya pembuat kebijakan.

b. Bagi peneliti, membantu meningkatkan ketajaman analisis serta ketepatan dalam menjelaskan urgensi suatu isu. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang disajikan didukung oleh data atau bukti yang relevan.

c. Bagi pembuat kebijakan, memberikan informasi mengenai kebijakan yang dinilai kurang efektif serta menawarkan alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan, baik melalui perbaikan kebijakan maupun penggantian kebijakan yang ada.

5. Sistematika Penyusunan *Policy Brief*

Berdasarkan (Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No.28 Tahun 2017) terdapat beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan *policy brief* setidaknya harus mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut:

a. Judul
   1) Menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut.
   2) Memunculkan minat pembaca.
   3) Singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan.

b. Ringkasan eksekutif *(executive summary)*
   1) Faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya.
   2) Mengapa masalah tersebut perlu/strategis.
   3) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

4) Siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut.

c. Pendahuluan

1) Terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan.
2) Memuat topik yang akan dibahas.
3) Mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat.

d. Deskripsi Masalah

1) Spesifik langsung ke inti permasalahan.
2) Terukur disertai bukti-bukti yang memadai.
3) Analisis (apa, dimana, siapa, mengapa, dampak/efek).

e. Rekomendasi

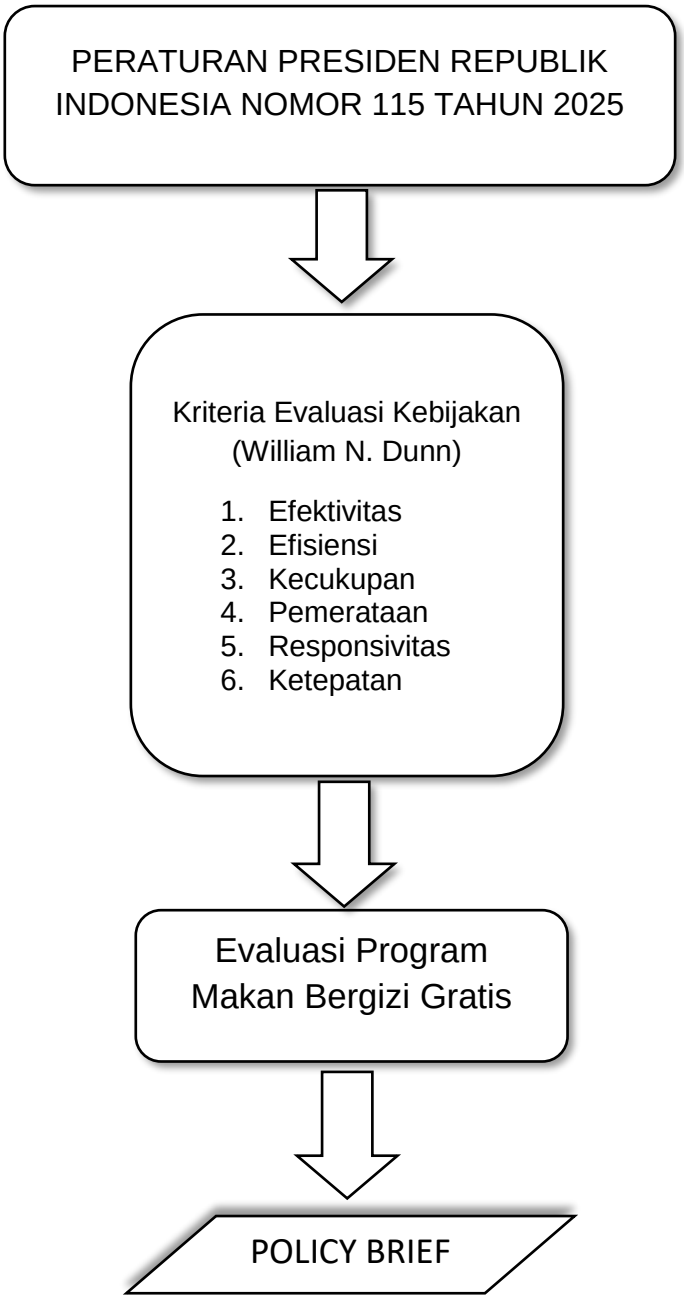
1) Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat.
2) Terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan (stakeholder) serta didukung oleh faktor-faktor yang ada.
3) Alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan gambaran singkat alternatif yang dipilih).

f. Apendiks (jika diperlukan)

g. Referensi utama

C. Kerangka Pikir

Gambar 1
Kerangka Pikir



Sumber: Data Primer, 2026

D. Indikator Penelitian

Untuk menilai keberhasilan dan kualitas pelaksanaan program MBG, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yang mencakup enam kriteria evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

   Menilai sejauh mana tujuan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Penilaian ini difokuskan pada sejauh mana program mampu mencapai tujuan dalam mendukung pemenuhan dan peningkatan status gizi kelompok sasaran. Selain itu, efektivitas juga dilihat dari kesesuaian hasil yang diperoleh dengan tujuan Program MBG yang telah ditetapkan. Melalui indikator ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji apakah tujuan yang diharapkan dari Program MBG telah terwujud di lapangan.

2. Efisiensi

   Menilai sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan program. Penilaian ini mencakup penggunaan anggaran, tenaga pelaksana, waktu, serta sumber daya lainnya dalam mendukung penyediaan dan penyaluran makanan kepada penerima manfaat. Selain itu, indikator ini juga melihat kesesuaian antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh, sehingga dapat diketahui apakah program telah berjalan secara hemat dan tidak menimbulkan pemborosan.

3. Kecukupan

   Menilai sejauh mana hasil dari Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar mampu memenuhi kebutuhan yang menjadi dasar dilaksanakannya program tersebut. Dalam hal ini, penilaian diarahkan pada sejauh mana makanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan gizi kelompok sasaran sesuai dengan tujuan program. Selain itu, kecukupan juga mengkaji kesesuaian makanan yang diberikan dengan kebutuhan penerima manfaat, baik dari segi porsi maupun kandungan gizi. Dengan demikian, indikator ini berfokus pada kesesuaian antara manfaat yang diberikan melalui Program MBG dengan kebutuhan gizi kelompok sasaran.

4. Pemerataan

   Menilai sejauh mana manfaat program MBG menjangkau sekolah sasaran secara merata di Kota Makassar. Dalam hal ini, penilaian diarahkan pada apakah program dapat memberikan manfaat secara adil kepada kelompok penerima sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerataan juga mengkaji sejauh mana cakupan program dapat menjangkau berbagai kelompok penerima manfaat serta memastikan bahwa distribusi makanan dapat diterima secara merata. Dengan demikian, indikator ini berfokus pada sejauh mana manfaat Program MBG dapat dirasakan secara adil dan merata oleh kelompok sasaran.

5. Responsivitas

   Menilai sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis mampu merespons kebutuhan dan masukan dari kelompok sasaran di Kota Makassar. Dalam hal ini, penilaian diarahkan pada apakah pelaksanaan program telah mempertimbangkan kebutuhan penerima

manfaat terhadap makanan yang diberikan. Selain itu, responsivitas juga mengkaji sejauh mana pihak pelaksana mampu menanggapi masukan, keluhan, maupun harapan penerima manfaat terhadap pelaksanaan Program MBG. Dengan demikian, indikator ini berfokus pada kesesuaian antara pelaksanaan program dengan kebutuhan dan tanggapan kelompok sasaran.

6. Ketepatan

   Menilai sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang tepat dalam menjawab kebutuhan gizi kelompok sasaran di Kota Makassar. Dalam hal ini, penilaian diarahkan pada kesesuaian antara tujuan dan sasaran program dengan kondisi serta kebutuhan nyata penerima manfaat. Selain itu, ketepatan juga mengkaji apakah Program MBG telah diberikan kepada kelompok yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan mampu memberikan manfaat yang relevan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, indikator ini berfokus pada kesesuaian antara tujuan, sasaran, dan kebutuhan penerima manfaat dalam pelaksanaan Program MBG.

Dengan hal ini, penggunaan keenam indikator evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian dan permasalahan Program MBG di Kota Makassar serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program di masa mendatang agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi penerima manfaat.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi temuan bagi peneliti dan dijadikan bahan acuan untuk dapat ditinjau lebih lanjut, sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Imam Nurin Eyes, Zakaria Erwin Nadia (2025)	Evaluasi Program Makan Siang Gratis di Sekolah: Dampak terhadap Gizi, Kesehatan, dan Motivasi Belajar Siswa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Eyes dan Nadia menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Siang Gratis di sekolah masih menghadapi beberapa kendala. Permasalahan utama yang ditemukan yaitu menu makanan yang kurang bervariasi dan tidak sepenuhnya sesuai dengan selera siswa sehingga menimbulkan sisa makanan. Selain itu juga, terdapat pula kendala dalam kepatuhan siswa untuk mengonsumsi makanan yang disediakan serta dalam pengelolaan limbah makanan yang dihasilkan dari program tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara berkala serta keterlibatan guru, orang tua, dan pihak sekolah agar pelaksanaan program dapat berjalan

			efektif di masa mendatang (Eyes & Nadia, 2025).
2.	Ronaan Maulana Basuki, Nur Wahid Muharrom, Nicholas Adi Kusuma, dan Kuswan Hadji (2026)	Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional	Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi kendala, seperti belum adanya dasar hukum yang spesifik, lemahnya koordinasi antar instansi, serta tata kelola program yang belum optimal. Selain itu, distribusi penerima manfaat program dinilai belum merata karena masih banyak terpusat di Pulau Jawa, sementara sejumlah daerah dengan tingkat stunting tinggi belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari program tersebut. Program ini juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan kualitas makanan dan pengelolaan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengawasan yang lebih baik agar

			pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih efektif (Basuki et al., 2026)
3.	Marsha Khanisa Lubis, Muhammad Fajar Dismawan, Sekar Putri Hapsari, Undang Rosidin dan Handoko (2025)	Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 1 Sukadanaham	Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berdampak positif terhadap kesiapan belajar, konsentrasi, dan motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, program ini juga mempengaruhi kehadiran siswa di sekolah dan membantu siswa mendapatkan gizi yang lebih baik. Program ini juga mendorong siswa untuk mulai membiasakan diri dengan kebiasaan makan yang lebih sehat dan mengurangi kebiasaan jajan sembarangan. Namun, beberapa kendala masih ditemui dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan distribusi makanan yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran, kurangnya variasi menu, dan dampak ekonomi pada pedagang kantin sekolah

			karena berkurangnya pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan manajemen distribusi makanan, peningkatan variasi menu, dan pemantauan kualitas dan kebersihan makanan agar program MBG dapat beroperasi lebih efektif dan berkelanjutan (Lubis et al., 2025).

Ada banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas pelaksanaan Program MBG. Namun, penelitian masih belum pernah dilakukan di Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut menjadi referensi dan inspirasi dalam menyusun rekomendasi kebijakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.